

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat rentan terhadap bencana. Bencana ini dapat disebabkan oleh peristiwa alam, non alam, serta aktivitas manusia. Menurut Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam maupun non alam serta manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta bencana, serta dampak psikologis. Dari indeks risiko bencana alam pada pertengahan tahun 2021 menunjukkan bahwa gempa bumi tetap menjadi ancaman terbesar kedua di Indonesia, dengan indeks 8,9 poin dalam skala 0-10 poin, yang berarti bahwa poin yang lebih tinggi menunjukkan tingkat risiko bencana yang lebih tinggi. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rentan terhadap gempa bumi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), jalur pertemuan lempeng berada di laut sehingga apabila terjadi gempa bumi dengan intensitas besar di kedalaman dangkal, hal tersebut juga dapat menyebabkan tsunami. Akibat sering terjadinya gempa bumi sehingga banyak orang meninggal dan rusak harta benda, bencana alam ini harus diantisipasi secepat mungkin oleh masyarakat dan lembaga pemerintah.

Daerah Yogyakarta merupakan daerah yang berada di Indonesia dengan memiliki potensi bencana alam seperti gempa. Yogyakarta menjadi salah satu daerah rawan gempa, hal ini dikarenakan daerah

Yogyakarta memiliki beberapa sesar seperti sesar opak, subduksi, progo, dengkung dan oya. Pada tahun 2006 Daerah Yogyakarta diguncang gempa yang cukup besar sehingga menyebabkan banyak kerugian. Gempa bumi ini terjadi karena aktifnya sesar opak, hingga saat ini sesar opak merupakan sesar yang terus menghasilkan gempa, meskipun kecil. Area yang cukup luas dibentuk oleh sesar opak dari Parangtritis hingga Prambanan. Area ini melintas dari Parangtritis hingga Pleret, Piyungan, dan Prambanan (Umah, 2022). Sesar opak merupakan salah satu sesar yang masih aktif dengan magnitudo mencapai 6,6M dan membentang kurang lebih 45 kilometer dari utara hingga selatan Yogyakarta (Perwitasari, 2023).

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa secara tektonik wilayah daerah Yogyakarta merupakan wilayah yang rawan gempa bumi. Kondisi ini disebabkan oleh fakta bahwa daerah Yogyakarta berada di dekat zona tumbukan lempeng di Samudera Indonesia. Selain itu, hal ini dikarenakan oleh aktivitas sesar-sesar lokal di daratan Yogyakarta sangat rentan terhadap gempa bumi. Yogyakarta adalah daerah seismik yang aktif karena sifat tektoniknya yang kompleks (Setiawati, 2023). Maka dari itu berdasarkan peraturan daerah tentang kebencanaan yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah sebagai induk peraturan kebencanaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta dibentuk untuk memenuhi tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana. BPBD bertanggung jawab untuk menangani bencana alam, sosial, dan non alam secara terencana, antisipatif, terpadu, dan menyeluruh, di seluruh wilayah Kota Yogyakarta (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023).

Penanggulangan bencana di Daerah Yogyakarta telah ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjalankan urusan pemerintah daerah. Dalam manajemen bencana BPBD mampu memberikan kebijakan yang berfokus dalam meningkatkan kapasitas dalam meminimalisir kerentanan terhadap bencana. BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki fungsi sebagai koordinator dalam pelaksanaan penanggulangan bencana daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam risiko bencana.

Menurut Undang Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa penanggulangan bencana menjadi suatu upaya dalam pelaksanaan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan yang berhubungan dengan bencana yang dapat dilaksanakan pada sebelum, pada saat, maupun setelah bencana. Dan menurut Undang Undang No. 24 Tahun 2007 Pasal satu tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa bencana alam merupakan bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain.

Manajemen bencana merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam meminimalisir risiko dan kerugian yang disebabkan oleh bencana. Pelaksanaan manajemen bencana meliputi perencanaan, penanggulangan, dan tindakan setelah terjadinya bencana . Tujuan dari

manajemen sendiri merupakan untuk mengurangi risiko bencana terhadap masyarakat, bangunan, dan juga harta benda yang disebabkan oleh bencana (Elitery, n.d.). Manajemen bencana dapat dikatakan penting karena mampu mencegah mengurangi jumlah korban jiwa, mengurangi kerusakan yang terjadi karena gempa, meningkatkan sikap kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, mempercepat pemulihan yang terjadi pasca bencana, mengurangi kerugian akibat bencana, dan mampu meningkatkan koordinasi antar pihak pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Didasarkan pada fungsi manajemen klasik, manajemen penanggulangan bencana merupakan proses yang dinamis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian, dan pengawasan dalam pengamanan bencana. Selain itu, berbagai macam organisasi yang harus bekerja sama untuk mencegah, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pascabencana (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2017).

Manajemen sering kali dikaitkan dengan POAC, pada hakikatnya manajemen bencana memiliki fungsi yaitu POAC. Menurut George R. Terry POAC atau singkatan dari *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* merupakan salah satu prinsip dasar yang hubungan dengan manajemen. POAC merupakan kerangka kerja yang sangat penting dalam manajemen karena melibatkan upaya untuk mengantisipasi kecenderungan masa depan serta menetapkan strategis untuk mencapai tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menangani bencana seperti gempa. Dengan melaksanakan setiap elemen POAC secara efektif, organisasi dan individu dapat merespons bencana dengan lebih baik dalam mengurangi risiko serta meningkatkan resilien

masyarakat terhadap bencana di masa yang akan datang. POAC juga membantu memastikan bahwa manajemen bencana tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan terencana dengan baik. Dalam POAC, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga melaksanakan koordinasi dengan instansi lain serta masyarakat agar dapat memaksimalkan upaya penanggulangan bencana (Indrawati et al., 2022).

Dalam pelaksanaan manajemen terutama mitigasi gempa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta keterkaitan stakeholder sangat memiliki pengaruh penting dalam penanggulangan gempa bumi yang sering terjadi di Provinsi Daerah Yogyakarta. Hal ini merupakan salah satu penelitian yang jarang diteliti dan penting diteliti karena Keterlibatan stakeholder dalam mitigasi gempa sangat penting untuk mengurangi risiko bencana. Pihak yang bertanggung jawab, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum, sangat penting dalam persiapan, serta pemulihan bencana gempa. Mereka membantu meningkatkan partisipasi dalam kegiatan mitigasi, bekerja sama dengan berbagai pihak berwenang, serta memberikan data dan informasi. Untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menumbuhkan budaya sadar bencana, kolaborasi antara berbagai pihak berwenang dapat dilakukan. Pada akhirnya, ini akan mendukung upaya mitigasi bencana yang efektif (Hadi, 2019). Hal ini dapat dilihat dari keterbatasan dari pemerintah sebagai pelayan publik dalam menanggulangi bencana di Provinsi Yogyakarta terutama gempa, sehingga perlu adanya keterlibatan pihak lain agar mempermudah pemerintah dalam mencapai hasil yang maksimal. Sehingga adanya collaborative governance yang didasarkan oleh sifat saling

membutuhkan antar organisasi dalam mengurus suatu permasalahan atau kegiatan. Pada setiap level organisasi, kolaborasi sangat dibutuhkan karena pada dasarnya kolaborasi merupakan kerja sama yang dapat berlangsung dalam dua konteks, yaitu kerja sama internal maupun eksternal serta antarorganisasi (Noor et al., 2022). Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui keterkaitan stakeholder dalam mitigasi gempa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana Keterlibatan Stakeholder dalam Mitigasi Gempa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pendekatan POAC?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan oleh sebab itu tujuan penelitian ini yakni untuk dapat menganalisis terkait keterlibatan stakeholder dalam manajemen mitigasi gempa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk dapat memperluas wawasan dalam pengetahuan kebencanaan yang berfokus dalam mitigasi gempa
2. Dapat menjadi bahan pendukung untuk penelitian-penelitian yang berfokus pada manajemen mitigasi gempa

b. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah dan masyarakat

Manfaat bagi pemerintah dan masyarakat dapat memberikan informasi terkait keterlibatan stakeholder pada manajemen mitigasi gempa yang dilakukan oleh pihak pemerintah.

2. Bagi penulis pengalaman baru, memperluas pengetahuan serta memperdalam teori yang berkaitan dengan manajemen mitigasi gempa selama menempuh pendidikan perkuliahan.

Manfaat bagi penulis dari penelitian ini akan memberikan

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menunjukkan orisinalitas judul skripsi, perlu melihat penelitian terdahulu yang hampir sesuai dengan tema maupun objek penelitian. Tujuan untuk dapat menganalisis beberapa perbedaan dari penelitian ini. Beberapa sumber penelitian yang berasal dari skripsi, hingga makalah penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut :

No.	Judul	Penulis	Hasil Penelitian
1.	<p>Pelaksanaan Manjemen <i>Planning,</i> <i>Organizing,</i> <i>Actuacting,</i> <i>Controlling</i> (POAC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam Menanggulangi Bahaya Banjir (Studi pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)</p>	Yusiana AS (2013)	<p>Dalam penelitian tersebut, menjelaskan tentang kinerja BPBD yang masih belum optimal dalam melaksanakan fungsi POAC dalam manajemen Bencana, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan manajemen POAC BPBD Kota Bandar Lampung.</p>

2.	<p>Manajemen Mitigasi Bencana Kota Palu Palu City Disaster Mitigation Management</p>	<p>Widarti Gularsih Sukino, Muhammad Ahsan Samad,Nasir Mangngasing, Abdul Rivai (2019)</p>	<p>Dalam penelitian tersebut menjelaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, salah satunya perlindungan terhadap bencana. Penanggulangan dan pengurangan risiko bencana merupakan rencana pemerintah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019) yang dilandasi dari kenyataan bahwa Indonesia terpapar oleh berbagai fenomena alam yang berpotensi menimbulkan resiko bencana.</p>
----	--	--	---

3.	Manajmen POAC pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BDR di SMP Negeri 2 Praya Barat Daya)	Khairul Akbar, Hamdi, Lalu Kamrudin, Fahrudin (2021)	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa manajemen BDR oleh kepala sekolah di SMP Negeri 2 Praya Barat Daya yaitu: 1) <i>Planning</i> , melakukan pendataan siswa yang memiliki perangkat elektronik, kemudian merencanakan persiapan BDR secara online maupun offline 2) <i>Organizing</i> , yaitu membagi siswa menjadi dua kelompok pembelajaran seperti kelompok online serta kelompok offline.3) <i>Actuacting</i> , yaitu pengenalan tentang alat serta metode pembelajaran baik secara daring maupun luring diikuti dengan penerapan BDE. 4) <i>Controlling</i> , yaitu evaluasi program BDR di tingkat sekolah dimulai pada akhir tahun akademik 2019/2020.
4.	Penguatan kesiapsiagaan	Hasrul Hadi, Sri Agustina, Armin	Dalam penelitian tersebut, menjelaskan kesiapsiagaan

	Stakeholder dalam Pengurangan Risiko Bencana Gempabumi	Subhani (2019)	stakeholder yang terdiri dari komunitas pemerintah, masyarakat dan sekolah harus terus ditingkatkan sampai level sangat siap dalam menghadapi bencana alam gempa bumi. Dengan demikian risiko bencana alam gempa bumi seperti jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda serta gangguan psikologis akan dapat dikurangi dengan signifikan.
5.	Peran Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana (Studi Kasus Manajemen Bencana)	Rusli, Ayu Fitriatul'Uya (2018)	Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan bahwa menurut Entatarina Simanjuntak upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan serta penanggulangan bencana tidak dapat berhasil tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, untuk itulah pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan

			masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi bencana terhadap dampak perubahan iklim dan bencana.
6.	Peran Stakeholders dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tsunami Selat Sunda di Provinsi Lampung Tahun 2018	Lusi Apriyani, Agus Ngadio, Fahmi Yoesmar (2020)	Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan bahwa mitigasi dilakukan untuk meminimalisir dampak bencana. Keterbatasan alat, kurangnya keseriusan pemerintah dalam mitigasi bencana, serta informasi yang kurang menjadi faktor-faktor yang dapat menghambat penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara yuridis, penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur di dalam Undang-

			Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
7.	Mitigasi Bencana Gempa bumi di Cianjur	Zainal Muskin, Abdur Rahim, Andi Hermansyah Azhari Samudra, Evi Sarispi (2023)	Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan bahwa dengan terjadinya bencana alam tersebut perlu disadari oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah serta stakholder yang terlibat didalamnya agar dapat melakukan mitigasi sehingga mampu mengurangi korban jiwa. Pra bencana menjadi salah satu tahap yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menyusun perencanaan pada penanggulangan bencana sehingga mampu mengurangi

			ancaman yang terjadi
8.	Manajemen Mitigasi Bencana pada Peserta Didik untuk Mengurangi Risiko Bencana Gempa Bumi	Irawan, Yuli Subiakto, Bambang Kustawan (2022)	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa mitigasi menjadi bagian dari tahap awal penanggulangan bencana. Oleh karena itu, serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Gempa bumi ini menjadi salah satu bencana alam yang akan terjadi secara terus menerus yang dapat memberikan dampak kerugian materi, korban jiwa dan trauma yang berkepanjangan. Berdasarkan

			<p>kenyataan itulah harus ada upaya preventif semua pihak untuk mengurangi risiko dan dampak kerugian yang ditimbulkannya dengan manajemen mitigasi bencana sejak dini.</p>
9.	<p>Kolaborasi Stakeholder Pada Pelaksanaan Inovasi Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Di Nusa Tenggara Barat Tahun 2018</p>	<p>Suryanuddin, Annisah (2021)</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan bahwa kolaborasi dan sinergi dari berbagai stakeholder, berperan besar dalam mengatasi dana ganda. Desain RTG dari Kementerian PUPR memudahkan masyarakat dalam merencanakan dan membangun kembali rumahnya. Setiap stakeholder memiliki peran yang sama besar dan sama pentingnya dalam menyinergikan dan mengolaborasikan semua stakeholder untuk mendukung tercapainya tujuan</p>

			penanggulangan bencana.
10.	Manajemen dan Pengurangan Risiko Bencana di Tiongkok : Gempa Sichuan 2008	Erlita Tantri (2016)	<p>Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa mitigasi menjadi salah satu manajemen bencana dalam pengurangan risiko bencana yang dapat melalui teknologi.</p> <p>Pembangunan secara struktural dan non-struktural merupakan langkah untuk mengurangi risiko bencana.</p> <p>Selain itu, perlunya menerapkan teknologi untuk memperkecil terjadinya gempa besar dan susulan maupun melakukan pemberdayaan masyarakat mengenai</p>

			pengetahuan dan penyelamatan saat terjadi gempa.
--	--	--	--

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan, penelitian sebelumnya telah menjelaskan tentang manajemen mitigasi bencana gempa bumi, pelaksanaan manajemen POAC yang telah dilakukan oleh BPBD, serta keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan mitigasi secara struktural maupun non-struktural. Oleh karena itu, penelitian ini akan memperdalam dan berfokus pada analisis terhadap keterlibatan stakeholder dalam manajemen mitigasi yang dilaksanakan oleh BPBD. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang menetail terhadap keterlibatan stakeholder dalam manajemen mitigasi gempa dengan pendekatan POAC yang dilakukan oleh BPBD Provinsi DIY. Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji kebijakan yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait dalam manajemen mitigasi gempa, peneliti dalam hal ini menggunakan teori George R.Terry manajemen POAC berfokus pada empat variabel manajemen yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), *Controlling* (Pengawasan). Selain itu, yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah studi kasus pada bencana alam yang di teliti.

F. Kerangka Teori

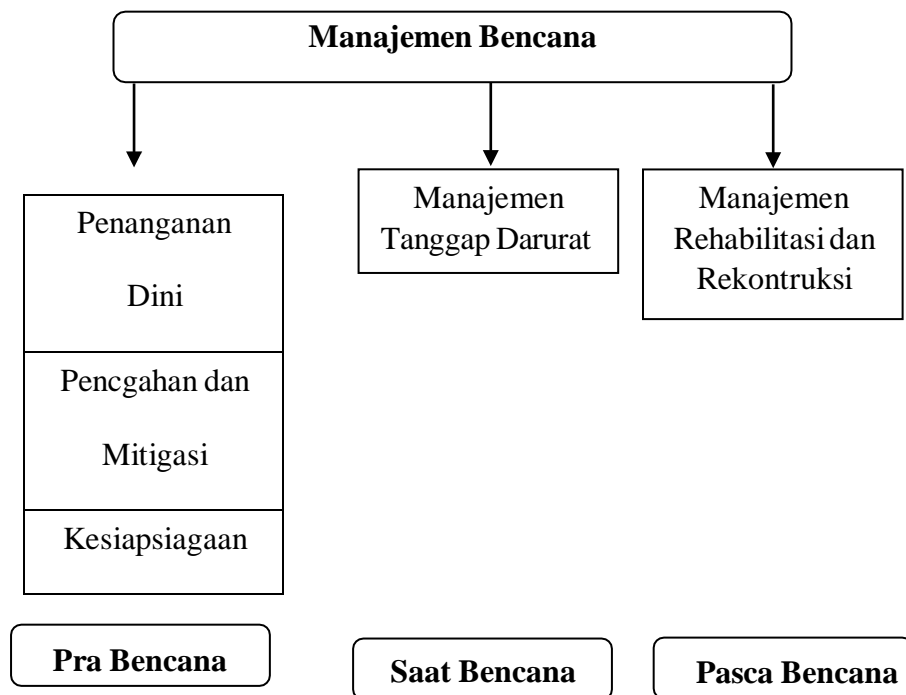
a. Pengertian Manajemen Bencana

Menurut UU No.24 Tahun 2007, manajemen bencana merupakan suatu proses yang memiliki sifat berkelanjutan, dinamis,

dan terpadu yang dimaksud untuk meningkatkan kualitas tindakan yang berkaitan dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan serta observasi dan analisis bencana (BPBD Kabupaten Bogor, 2019). Selain itu, manajemen bencana diartikan sebagai suatu rencana, struktur, dan pengaturan yang bekerja sama dengan pemerintah, lembaga non-pemerintahan (profit dan non-profit), dan komunitas untuk mengatasi berbagai kebutuhan penanggulangan bencana serta menyeluruh (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2017). Kerusakan yang terwujud meliputi benda-benda material yang terancam, seperti nyawa manusia, harta benda, kapasitas produksi, dan lingkungan. Manajemen bencana dapat dikaitkan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang merupakan proses yang direncanakan dan memiliki struktur untuk mengelola bencana dengan baik dan aman. Serangkaian Tindakan yang mencakup penentuan kebijakan Pembangunan yang mengandung risiko bencana, aktivitas pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi bencana. Dalam melindungi Masyarakat, aset ekonomi, dan juga lingkungan yang berdampak dari bencana. Maka pemerintah pusat maupun daerah melakukan collaboration atas pertanggung jawaban untuk mengelola bencana. Partisipasi Masyarakat dalam manajemen bencana ini sangat penting dan perlu adanya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mempermudah pemerintah dalam melakukan collaboration. Sehingga, Masyarakat mampu menjalin komunikasi satu sama lain, sehingga mekanisme transformasi manajemen bencana menjadi implementasi

Pembangunan dan berdampak pada kehidupan sehari-hari dapat menjadi lebih baik.

Dalam manajemen bencana ini juga memiliki tahapan dalam pelaksanaannya mulai dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. berikut merupakan gambaran mengenai kegiatan manajemen bencana menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, menjelaskan beberapa tahapan mengenai rangkaian dalam proses manajemen bencana.



Sumber :Modul Manajemen Penanggulangan Bencana, Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2017

Manajemen bencana bertujuan untuk mengurangi atau mencegah kerugian yang disebabkan oleh bencana untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan memadai dalam menjaga kelancaran pemulihan bencana (BPBD Kabupaten Bogor,

2019).

Manajemen sering kali dikaitkan dengan POAC, pada hakikatnya manajemen bencana memiliki fungsi yaitu POAC. Menurut George R. Terry POAC merupakan salah satu prinsip dasar yang berhubungan dengan manajemen yang penting dalam manajemen karena melibatkan upaya untuk mengantisipasi kecenderungan masa depan serta menetapkan strategi untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka teori ini, dijelaskan bahwa terdapat empat variabel yang menghubungkan manajemen yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Teori manajemen George R. Terry (1997) menggambarkan manajemen sebagai suatu proses yang terdiri atas dasar perlu diperhatikan saat melakukan tugas manajemen penanggulangan bencana. Berikut merupakan penjelasan fungsi manajemen bencana menurut George R. Terry : George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:11) mengemukakan tentang *Planning* sebagai berikut, yaitu

“Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to achieve desired result”. “Perencanaan adalah pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”.

Fungsi perencanaan ini dapat dikaitkan dengan manajemen bencana yang merupakan proses dari rangkaian suatu tindakan yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi jumlah korban manusia, kerusakan harta benda, dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh fenomena tersebut. Ada beberapa contoh perencanaan dalam penanggulangan bencana yaitu, merencanakan penataan ruang dari bahaya bencana, penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, serta merencanakan penyuluhan maupun pelatihan tanggap darurat (Saputra, 2019). Perencanaan manajemen bencana adalah tahapan pertama dalam siklus manajemen bencana dan dimaksudkan untuk mengurangi kematian, penderitaan, dan kerugian materi yang disebabkan oleh bencana (Ginanjari, 2018). Ada beberapa contoh perencanaan dalam penanggulangan bencana yaitu, merencanakan penataan ruang dari bahaya bencana, penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, serta merencanakan penyuluhan maupun pelatihan tanggap darurat (Saputra, 2019).

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian tidak akan mungkin terjadi jika tidak membangun hubungan satu sama lain dan menetapkan tanggung jawab khusus untuk setiap unit. George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukma, 2011:38) mengemukakan tentang pengorganisasian (*Organizing*) sebagai berikut, yaitu “*Organizing is the determining, grouping and arranging of the assigning of the people to these activities, the providing of suitable physical factors of environment and the indicating of the relative authority delegated to each respective activity.*” “Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan”. Selain itu, George R. Terry (Sukarna, 2011:46) juga mengemukakan tentang azas-azas *organizing* yaitu:

- a. *The objective* atau tujuan.
- b. *Departementation* atau pembagian kerja.
- c. *Assign the personel* atau penempatan tenaga kerja.
- d. *Authority and Responsibility* atau wewenang dan tanggung jawab.
- e. *Delegation of authority* atau pelimpahan wewenang.

Dalam manajemen bencana, pengorganisasian merupakan suatu proses kumpulan tindakan yang dilakukan untuk membagi tanggung jawab penanganan bencana, untuk tingkat nasional, BNPB serta BPBD merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penanganan bencana di Indonesia (Saputra, 2019).

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:82) mengatakan bahwa “*Actuating is setting all members of the group to want achieve to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts*”. “Pelaksanaan merupakan suatu proses

membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta berhubungan dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.” Menurut definisi di atas, tercapainya tujuan bergantung pada apakah semua anggota kelompok manajemen dari tingkat atas hingga tingkat bawah bergerak. Semua kegiatan harus berfokus pada tujuannya karena kegiatan yang tidak berfokus dapat membuang-buang waktu maupun materi. Untuk mencapai sasaran tertentu, perencanaan dan pengorganisasian merupakan hal yang dasar. Karena perencanaan menentukan tujuan, hingga program yang akan di laksanakan. Hal ini ada beberapa faktor yang diperlukan untuk pelaksanaan, yaitu :

1. *Leadership* (Kepemimpinan)
2. *Attitude and morale* (Sikap dan moral)
3. *Communication* (Komunikasi)
4. *Incentive* (Intensif)
5. *Supervision* (Supervisi)
6. *Discipline* (Disiplin).

Fungsi manajemen ini mampu mengendalikan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan pengorganisasian. Dalam manajemen bencana, fungsi ini dapat diartikan sebagai penggerakan atau pengendalian sumber daya manusia dalam menghadapi bencana, seperti dalam hal kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Fungsi ini merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen lainnya, seperti perencanaan, organisasi, pengendalian, serta fungsi-fungsi manajemen lainnya dalam

membuat rencana.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur, tertib, dan terarah. Meskipun rencana, organisasi, dan pengendalian baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib, dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai fungsi untuk mengawasi segala pelaksanaan agar mencapai tujuan. Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:110) mengatakan bahwa “*Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if the necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard.*” “Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu *standard*, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan *standard* (ukuran)”. George R. Terry (Sukarna, 2011 :116), mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu :

- a. *Determining the standard or basis for control*
(menentukan standard atau dasar bagi pengawasan)
- b. *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan)

- c. *Comparing performance with the standard and ascertaining the difference, if any* (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan)
- d. *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki Penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).

Pengawasan digunakan untuk memastikan bahwa suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan rencana dan juga tahapan yang telah ditetapkan, pengawasan adalah suatu proses perkumpulan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Dalam manajemen bencana, pengawasan dimaksudkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dapat memberikan hasil yang diharapkan. Pengawasan juga bertujuan untuk mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi, maupun sosial yang disebabkan oleh bencana. Dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan (Sauki & AS, 2013).

b. Mitigasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa Mitigasi merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengurangi

risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun mental, serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Kegiatan mitigasi juga dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan penataan ruang
2. Pelaksanaan penataan ruang
3. Pengaturan, pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan
4. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Mitigasi bencana juga menjadi salah satu rangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun kesadaran masyarakat, serta peningkatan kemampuan untuk menghadapi bencana. Contoh kegiatan mitigasi bencana termasuk membuat peta wilayah rawan bencana, membangun bangunan tahan gempa, menanam pohon bakau, menghijaukan hutan, dan memberikan pelatihan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang ditinggal di wilayah rawan bencana. Pada tahap pra bencana, masyarakat dapat melakukan hal-hal seperti membuat rencana untuk penyelamatan diri apabila bencana terjadi, melakukan pelatihan untuk menghadapi bencana, persiapan sarana maupun prasarana, serta membangun rumah yang kuat untuk menahan guncangan bencana (BPBD Kabupaten Purworejo, 2019). Saat terjadi bencana, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan. Dan fase setelah bencana, perlu adanya penyediaan tempat tinggal sementara bagi

korban, membangun kembali fasilitas dan prasarana yang rusak, serta melakukan evaluasi tindakan penanggulangan bencana (BPBD Kabupaten Bogor, 2022).

Mitigasi dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu sebagai berikut :

- a. Mitigasi struktural, adalah upaya untuk mengurangi bencana dengan membangun infrastruktur dan teknologi baru, seperti kanal pencegahan banjir, bangunan yang tahan gempa, dan sistem peringatan dini untuk gelombang tsunami. Upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana melalui rekayasa teknis bangunan yang tahan bencana dikenal sebagai mitigasi struktural. Bangunan yang dirancang sedemikian rupa sehingga mampu bertahan atau mengalami kerusakan yang tidak membahayakan apabila bencana terjadi. Prosedur perancangan struktur bangunan yang telah memperhitungkan karakteristik aksi bencana dikenal sebagai rekayasa teknis (Savetlana et al., 2019).
- b. Mitigasi non struktural, merupakan upaya untuk mengurangi dampak bencana. hal ini bisa terjadi dalam upaya pembantuan kebijakan, seperti membuat peraturan. Upaya non struktural untuk mitigasi ini dibidang kebijakan termasuk Undang-Undang Penanggulangan Bencana. contoh tambahan termasuk membangun tata ruang kota dan peningkatan kapasitas masyarakat, bahkan memulai berbagai aktivitas lain yang membantu meningkatkan kapasitas masyarakat. Ini dilakukan demi kepentingan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana (Savetlana et al., 2019).
- c. **Stakeholder**

Stakeholder merupakan kelompok atau individu yang memiliki kepentingan dalam kebijakan, program, atau pelayanan publik dan dapat dipengaruhi oleh lembaga pemerintah. Mereka dapat berasal dari latar belakang, seperti pengguna layanan publik, masyarakat umum, pelaku bisnis, politis, lembaga lembaga lain, serta pegawai pemerintah. Dalam konteks pemerintah, penting untuk memperhatikan kepuasan maupun kepentingan para stakeholder ini dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik (Setyaningsih, 2022). Jika dilihat dari posisi dan juga pengaruhnya, stakeholder dapat dibedakan menjadi tiga kelompok menurut Debora (2006) yang meliputi :

1. Stakeholder Primer

Stakeholder primer merupakan stakeholder yang memiliki kaitan yang kepentingannya secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek. Mereka merupakan penentu utama dalam proses pengambilan keputusan, dan mereka terbagi menjadi dua kelompok, yaitu manajemen publik dan tokoh utama yang mencakup lembaga maupun organisasi publik yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan serta implementasi keputusan.

2. Stakeholder Sekunder

Stakeholder sekunder merupakan stakeholder yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap kebijakan, program, atau proyek. Namun, karena kepedulian serta keprihatinan mereka mampu berpartisipasi dalam mempengaruhi sikap serta keputusan hukum pemerintah. Stakeholder yang dimaksud, meliputi :

1. Aparat pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung.
2. Lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan.
3. LSM dan pers setempat yang bergerak dibidang yang sesuai dengan rencana, manfaat, dampak yang muncul dan memerlukan perhatian.
4. Perguruan tinggi, kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah. Sektor swasta yang terkait.

5. Stakeholder kunci

Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan. Stakeholder utama yang dimaksud adalah unsur eksekutif pada tingkat mereka seperti, Pemerintah pusat, provinsi dan kota, DPR, DPRD Provinsi dan kota/kabupaten, Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan.

Stakeholder ini memiliki tujuan serta visi yang sama, pemangku kepentingan pada dasarnya menjadi pusat pengembangan. Koordinasi antar pemangku kepentingan terjadi melalui rumusan visi bersama dan partisipasi pemangku kepentingan (Ferrer, 2022). Secara umum, kolaborasi dalam visi bersama adalah *top down* karena dokumen visi-misi dibuat oleh pemerintah, meskipun mayoritas pemangku kepentingan juga terlibat dalam proses perumusannya. Pemerintah telah menyiapkan ide-ide untuk diketahui oleh para pemangku

kepentingan dan kemudian mereka dapat mengubah ide-ide tersebut menjadi formula standar.

G. Definisi Konseptual dan Operasional

a. Definisi Konseptual

1. Menurut George R.Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:11) mengemukakan tentang POAC, pada tahap awal *Planning* (Perencanaan) merupakan tahap awal dalam melibatkan analisis situasi saat ini, proyeksi masa depan, dan pengembangan strategi untuk mencapai tujuan. Proses ini mencakup pengidentifikasian sumber daya yang dibutuhkan, timeline, serta penetapan indikator keberhasilan. *Organizing* (Pengorganisasian) proses dalam melibatkan pembagian tugas, penentuan struktur organisasi, dan alokasi sumber daya untuk memastikan setiap orang memahami peran dan tanggung jawab. *Actuating* (Pelaksanaan), melibatkan motivasi dan pengarahan tim serta memastikan bahwa semua anggota organisasi bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Serta *controlling* (Pengawasan) melibatkan pemantauan hasil, membandingkan dengan rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Proses ini mencakup pengumpulan data, analisis kinerja, dan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan.
2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa

mitigasi merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana. Mitigasi merupakan istilah yang menacu pada tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko dan kerugian yang disebabkan oleh bencana. Ini mencakup upaya untuk mengurangi dampak bahaya melalui pengurangan kerentanan, peningkatan ketahanan, dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

3. Menurut Syahyuti (2005) tentang stakeholder merupakan partisipasi dalam proses munculnya kesadaran terhadap keterkaitan di antara stakeholders yang berbeda dalam masyarakat. Pembagian masyarakat tersebut adalah kelompok sosial dan komunitas dengan pengambilan kebijakan serta lembaga jasa lain. Sehingga stakeholder dapat didefinisikan sebagai proses interaktif yang bertujuan dalam pengelolaan proyek dan kebijakan yang melibatkan komunikasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan.

2. Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Perencanaan <i>(Planning)</i>	- Penataan ruang dari bahaya gempa	- Keterlibatan stakeholder dalam penyiapan RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) dalam penggunaan ruangan spasial kewilayahan yang rawan gempa.
	- Penyuluhan dan peningkatan kesadaran	- Keterlibatan stakeholder dalam mengimplementasikan sosialisasi maupun pendidikan mitigasi gempa.
	- Peraturan pembangunan	- Keterlibatan stakeholder dalam perumusan perundang-undangan Peraturan Pemerintah

Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	- Pengorganisasian sumber daya manusia	- Aktor yang terlibat Pembagian peran maupun tugas
	- Pembuatan peraturan infrastruktur	- Keterlibatan stakeholder dalam penyusunan rencana strategis atau rencana konstruksi yang mencakup Building codes dan building standar maupun sertifikasi tukang serta mandor.
	- Pembentukan tim pelatihan mitigasi gempa	- Aktor yang terlibat dan penanggung jawab pelatihan dan pemilihan lokasi pelatihan mitigasi gempa.
Pelaksanaan (<i>Actuating</i>)	- Pembangunan infrastruktur	- Keterlibatan stakeholder dalam mengimplementasikan rumah tahan gempa

		<p>maupun bangunan tahan gempa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan sekolah maupun rumah sakit tahan gempa (fasilitas kritis)
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggara pendidikan dan pelatihan mitigasi gempa 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan stakeholder dalam implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dalam mewujudkan sekolah yang tangguh dan aman bencana.
	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan stakeholder dalam memastikan tata ruang sesuai RTRW dengan mengelola kepadatan, penggunaan lahan, lokasi penggunaan,

		dan industri penyusunan dalam penggunaan ruang kewilayahan yang rawan gempa.
Pengawasan (<i>Controlling</i>)	- Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang	- Keterlibatan stakeholder dalam pengawasan penyelenggaraan tata ruang sesuai RTRW wilayah provinsi dalam penggunaan ruangan spasial kewilayahan yang rawan gempa
	- Pengawasan pembangunan infrastruktur	- Keterlibatan stakeholder dalam pengawasan terhadap pembangunan rumah serta fasilitas kritis tahan gempa
	- Pengawasan pelatihan	- Keterlibatan stakeholder dalam

	maupun pendidikan bencana	pengawasan terhadap pengimplementasian SPAB.
--	---------------------------------	--

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sering digunakan dalam sebuah penelitian pada suatu kondisi objek. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan suatu kepekaan dalam permasalahan yang dialami, untuk menerangkan kenyataan yang berhubungan dengan pencarian teori dan meningkatkan uraian dari fenomena yang dialami (Gunawan, 2013). Metode deskriptif dapat dikatakan sebagai prosedur pemecahan permasalahan yang diamati maupun diselidiki dengan suatu gambaran kondisi subjek ataupun objek dalam riset yang bersumber pada fakta- fakta yang terjadi. Dalam penelitian ini memuat data sekunder yang diperoleh dari sumber yang telah ada, data yang ada diartikel ini juga didapatkan secara tidak langsung. (Dr. Harnovinsah, 2020).

Penelitian ini berfokus dalam pengumpulan fakta-fakta terkait dengan keterlibatan stakeholder dalam manajemen mitigasi gempa di Provinsi DIY. Berdasarkan pada data yang telah terkumpul di lapangan dengan berbagai fakta-fakta yang ada dapat dilakukan analisis secara mendalam. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif dengan melakukan wawancara untuk memberikan

gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dianggap lebih mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam, terutama dengan keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berinteraksi langsung dengan objek penelitian. Penelitian ini mungkin akan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap keterlibatan stakeholder dalam mitigasi gempa.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis terletak pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIY, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Manusia (PUPESD) DIY, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRF) DIY.

c. Unit Analisis Data

Unit analisis data merupakan obyek nyata yang akan diteliti, penelitian dilakukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan narasumber staf BPBD Provinsi Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan, pihak BPBD merupakan pihak yang relevan untuk dijadikan narasumber pada penelitian ini.

d. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Hasan (2002:28) menyatakan bahwa “Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer yang dimaksud, seperti, catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, serta data-data mengenai informan”. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPR), serta Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda), Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dilakukan secara langsung (*face to face*) di Kantor BPBD Provinsi Yogyakarta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPR), serta Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016:225) menyatakan bahwa “Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer”. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data

sekunder seperti, buku e-modul Mitigasi Bencana Gempa Bumi, Modul Manajemen Penanggulangan Bencana, serta artikel-artikel Mitigasi bencana yang ditulis oleh BPBD, Dokumen Keputusan Kabadiklat Kemhan, serta laporan-laporan tentang mitigasi serta manajemen bencana.

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah kumpulan cara yang dilakukan agar mendapatkan data dari objek penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai dasar analisa dalam menentukan hasil penelitian. Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian dan memiliki informasi yang relevan dengan judul penelitian. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber telah direncanakan sebelumnya dan menggunakan urutan pertanyaan standar. Pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat akan diajukan kepada jajaran Badan Penanggulangan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta. Narasumber atau informan dalam penelitian ini di antaranya :

No	Narasumber	Jumlah	Pertanyaan
1.	Analisis Mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY (Bapak Julianto Wibobo)	1	<ul style="list-style-type: none"> - Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam mitigasi gempa di DIY? - Apa yang dilakukan BPBD dalam perencanaan penyiapan RTRWP? - Kontribusi apa saja yang dilakukan BPBD dalam penyuluhan dan peningkatan kesadaran? - Apakah BPBD turut serta dalam pembentukan kebijakan peraturan pembangunan? - Apa saja yang dilakukan oleh BPBD dalam pengorganisasian SDM, peraturan infrastruktur, serta pembentukan tim pelatihan mitigasi? - Bagaimana keterlibatan BPBD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mitigasi serta pengawasan dalam pembangunan infrastruktur, SBAP dan pelaksanaan tata ruang?
2.	Staff Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Minera (Ibu Mala)	1	<ul style="list-style-type: none"> - Apa yang dilakukan oleh Dinas PUPESDM dalam perencanaan peraturan pembangunan? - Bagaimana pelaksanaan standar dalam peraturan infrastruktur? - Apa dan bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh dinas dalam pembangunan infrastruktur?
3.	Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY (Bapak Rachmadiansyah)	1	<ul style="list-style-type: none"> - Apa yang dilakukan oleh dinas dalam RTRW? - Bagaimana keterlibatan DPTR pelaksanaan tata ruang serta apa saja yang dilakukan oleh Dinas? - Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh dinas serta apa saja konsekuensi yang diberikan kepada dinas jika ada yang melanggar? - Siapa yang terlibat dalam pengawasan pembangunan

			infrastruktur
5.	Staff Seksi Pengaturan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY (Ibu Difa)	1	- Apa yang dilakukan oleh dinas dalam RTRW?
6.	Kepala Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) DIY	1	-Apa yang dilakukan FPRB dalam perencanaan penyuluhan dan peningkatan kesadaran? - Bagaimana pelaksanaan SPAB yang dilakukan oleh FPR - Bagaimana pengawasan SPAB dilakukan - Siapa yang terlibat dalam pengawasan
	Jumlah	5	

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu data yang sangat penting dalam penelitian ini. Dokumen yang digunakan seperti Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana, Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DIY Tahun, Peraturan Walikota Yogyakarta, Peraturan Rumah Layak Huni (RLH), Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Mineral, Rencana Strategi Badan Penanggulangan Provinsi DIY, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY, Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, peta jalan SPAB.

J. Teknik Analisis Data

a. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data dengan cara mengumpulkan data dan reduksi yang ada. Informasi diperoleh melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Yogyakarta serta menggabungkan informasi yang dikumpulkan dari penelitian sebelumnya, observasi, wawancara serta dokumen yang mendukung. Sehingga dalam dokumen maupun data yang ada, mampu memberikan analisis terkait keterlibatan stakeholder dalam manajemen bencana (POAC) Mitigasi Gempa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta dalam Mitigasi Gempa. Oleh karena itu, diharapkan memiliki data yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan.

b. Penyajian Data

Tujuan penyajian data dalam penelitian ini merupakan bentuk dalam memudahkan pemahaman peneliti terhadap temuan yang diteliti dari hasil wawancara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Yogyakarta serta informan yang tercantum.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari penelitian ini. Tanpa mengurangi makna yang diungkapkan dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi serta observasi. Peneliti harus mengeksplorasi pola, korelasi persamaan, dan sebagainya yang dianggap relevan sebelum mengambil kesimpulan dari penelitian ini yang berkaitan dengan keterlibatan stakeholder dalam mitigasi gempa di Provinsi DIY dengan pendekatan manajemen bencana POAC.